



## Persepsi pegawai pemerintah mengenai faktor-Faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan kabupaten sidoarjo

Granita Dwi Matdia Suci Ningrum<sup>1</sup>, Ni Nyoman Alit Triani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Surabaya

<sup>1</sup>[granita.18008@mhs.unesa.ac.id](mailto:granita.18008@mhs.unesa.ac.id), <sup>2</sup>[nyomanalit@unesa.ac.id](mailto:nyomanalit@unesa.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 13 April 2022

Disetujui 15 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

### Kata kunci:

Pengendalian internal;  
Penegakan peraturan;  
Kompensasi; Komitmen organisasi; Budaya etis organisasi; Kecurangan

### Keywords :

*Internal control; Rule enforcement; Compensation; Organizational commitment; Organizational ethical culture; Fraud*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, dan Budaya Etis Organisasi terhadap Fraud di Sektor pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik yang diambil adalah teknik sampel sensus (sampling jenuh), sehingga sampel penelitian diperoleh sebanyak 161 responden meliputi pegawai pemerintah yang bekerja di bidang keuangan dan pengadaan barang/jasa di kantor instansi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan variabel penegakan peraturan, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap fraud, sedangkan variabel pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap fraud

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of Internal Control, Enforcement of Regulations, Compensation Suitability, Organizational Commitment, and Organizational Ethical Culture on Fraud in the government sector of Sidoarjo Regency empirically. This study used quantitative method. This study used primary data that obtained from the distribution of questionnaires. The technique that had taken in this study is the census sampling technique (saturated sampling), so the research sample obtained 161 respondents including government employees who work in finance and procurement of goods/services at the Sidoarjo Regency government agency office. Based on the tests that had been carried out, the results of the study showed that the variables of regulatory enforcement, compensation suitability, and organizational ethical culture have a positive effect on fraud, while the variables of internal control and organizational commitment do not affect fraud.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Kecurangan Akuntansi atau fraud merupakan istilah hukum yang mencakup berbagai tindakan. Fraud dapat diartikan sebagai kecurangan atau penipuan di bidang keuangan. Studi yang dikemukakan oleh Tunggal (201:189), fraud didefinisikan sebagai penipuan dalam sektor keuangan secara sengaja dengan maksud untuk merampas harta atau aset atau hak seseorang ataupun pihak lain. Selain di bidang keuangan, kecurangan juga dapat terjadi di bidang pengadaan barang/jasa. Kecurangan ini sering terjadi di sektor swasta maupun pemerintah (Hamdani et al. 2017). Kecurangan banyak terjadi di dalam sektor pemerintah, salah satunya ialah korupsi.

Studi Transparency International oleh The Global Coalition Against Corruption, Indonesia meraih skor 37 dan menduduki peringkat 102 pada tahun 2020. Di tahun 2019 lalu Indonesia meraih skor 40 dan menduduki peringkat 85 dari 180 negara. Penurunan indek persepsi korupsi dari angka 40 menjadi tiga 37 pada skala 0-100 menandakan pelaksanaan prinsip demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan sebaik-baiknya, dan masih rentan terhadap korupsi ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Skor 100 berarti sangat bersih dan skor 0 menunjukkan sangat korup .

ICW mempublikasikan Tren Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Semester pertama tahun 2021. Artikel menilai efektivitas Aparat Penegak Hukum Indonesia dalam mengatasi tindak kasus korupsi. Artikel ICW memaparkan ada 209 kasus korupsi yang ditangani oleh APH dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 26,83 Triliun. Dalam pemetaan kasus korupsi, tercatat

tiga sektor yang paling membuat rugi negara, yakni sektor dana desa, sektor pelayanan publik, dan sektor pertanian.

KPK telah banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu kasus yang terjadi yakni dilakukan oleh mantan Bupati Sidoarjo dengan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa senilai 600 juta pada tahun 2020. Kasus lain yaitu kasus korupsi anggaran APBDes tahun 2018-2019 oleh Kepala Desa Kemantren senilai Rp. 531 juta. Dan yang terbaru adalah kasus korupsi anggaran APBDes yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin senilai Rp. 174 juta pada tahun 2017 saat masih menjabat.

Penelitian ini mengaplikasikan *fraud triangle theory* yang digariskan oleh Cressey (1953). Tuanakotta (2007:105) menyebutkan, terdapat 3 faktor kecurangan yang diungkapkan dalam teori tersebut, antara lain; 1. Opportunity (Kesempatan); 2. Pressure (Tekanan); 3. Rationalization (Rasionalisasi).

Ada atau tidaknya peluang atau kesempatan akan mempengaruhi risiko kecurangan. Adanya peluang yang sangat besar, memungkinkan kecurangan akan lebih besar pula. Penting untuk memiliki pengendalian internal yang kuat dan penegakan peraturan yang kuat demi mendapatkan hasil pemantauan yang baik, maka memerlukan suatu proses monitoring di dalam suatu instansi. Peluang untuk melakukan kecurangan dipengaruhi oleh besarnya tekanan. Tekanan (*pressure*) merupakan tindak penipuan yang dilakukan karena adanya keegoisan individu. Hal ini disebabkan adanya tekanan dari aspek finansial maupun aspek lainnya, termasuk tekanan pribadi dan organisasi. Faktor utama penyebab tekanan di sektor swasta maupun pemerintah adalah tidak terpenuhinya kompensasi. Sedangkan rasionalisasi (*rationalization*) adalah proses berpikir atau suatu sikap yang memiliki pertimbangan moral pribadi untuk merasionalisasikan kecurangan. Dalam penelitian ini, rasionalisasi dikaji dengan komitmen organisasi dan variabel budaya etis organisasi.

Pengendalian internal adalah representasi dari seluruh aktivitas yang harus dilakukan dalam organisasi untuk memberikan jaminan terwujudnya pengendalian yang efisien dan efektif, keunggulan laporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan hukum (Tunggal, 2011:3). Joseph & Albert (2015) dan penelitian Alou, Hat, & Gamaliel (2017) mengutarakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif pengendalian internal terhadap fraud.

Penegakan peraturan merupakan proses melakukan usaha penegakan atau fungsi norma hukum sebagai acuan berperilaku dalam interaksi atau korelasi hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2008). Adinda (2015) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa tidak ada pengaruh antara penegakan peraturan terhadap kecurangan (fraud).

Faktor lain yang mempengaruhi fraud adalah ketidaksesuaian kompensasi. Menurut Mathis dan Jackson (2001) kompensasi adalah metode manajemen dalam meningkatkan prestasi, motivasi, dan kinerja karyawan. Waxley dan Yuki (2003:133) berpendapat bahwa ketidaksesuaian kompensasi yang memadai atau tugas yang membosankan dapat menyebabkan pekerja melakukan kecurangan. Wilopo (2009) dan Herlina (2016) mengutarakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan kecurangan (fraud). Penelitian lainnya dilakukan oleh Dewi (2017) menemukan hal yang selaras dengan penelitian sebelumnya.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya fraud yakni komitmen organisasi. Menurut Sutrisno (2010:296), komitmen pada organisasi tidak berarti sekedar keanggotaan formal saja, tetapi mencakup sikap mencintai organisasi dan kemauan untuk melakukan usaha tingkat tinggi demi mencapai tujuan. Mustikasari (2013) dan Pristiyanti (2012) mengutarakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecurangan (fraud).

Kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengendalian dan penegakan peraturan, sedangkan faktor eksternal salah satunya adalah budaya etis organisasi. Fraud dapat terjadi ketika organisasi tempat individu bekerja minim etika. Artini (2014) dan Lestari (2015) mengutarakan hasil penelitiannya bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara budaya etis organisasi terhadap kecurangan (fraud).

Rumusan masalah dinyatakan berdasarkan uraian latar belakang di atas, sebagai berikut; (1) Apakah variabel pengendalian internal terdapat pengaruh terhadap potensi kecurangan (fraud) pada Sektor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo? (2) Apakah variabel penegakan peraturan terdapat pengaruh terhadap potensi kecurangan (fraud) pada Sektor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo? (3) Apakah variabel kesesuaian kompensasi terdapat pengaruh terhadap potensi kecurangan (fraud) pada Sektor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo? (4) Apakah variabel komitmen organisasi terdapat pengaruh

terhadap potensi kecurangan (fraud) pada Sektor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo? (5) Apakah variabel budaya etis organisasi terdapat pengaruh terhadap potensi kecurangan (fraud) pada Sektor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo? Tujuan penelitian dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi, dan Budaya Etis Organisasi terhadap Fraud di Sektor pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini kuantitatif, yakni penelitian empiris dimana data yang diperoleh dapat dibentuk menjadi sesuatu yang dapat dihitung (Punch, 1988). Penelitian ini adalah proses dari mana teori, hipotesis, konsep penelitian, pemilihan subjek, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menulis kesimpulan (Bryman, 2005).

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data primer atau data mentah yang diperoleh dari obyek penelitian secara langsung. Pengumpulan data dengan metode survei yakni kuesioner yang disebar secara langsung dan selanjutnya diisi oleh responden.

### **Populasi dan Sampel**

Seluruh pegawai yang bekerja pada kantor instansi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 34 kantor. Pengambilan sampling yang dipergunakan adalah sampel sensus (sampling jenuh) yaitu teknik penarikan sampel non-profitabilitas dimana seluruh anggota populasi dipergunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2002:61-63 ), berdasarkan kriteria : (1) Memiliki pengetahuan mengenai arus keuangan; (2) Minimal masa kerja 1 tahun; (3) Minimal tingkat pendidikan SMA/SMK.

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Penelitian ini meliputi variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen) yang terdiri dari lima variabel dependen (X) yaitu; Pengendalian Internal (X1), Penegakan Peraturan (X2), Kesesuaian Kompensasi (X3), Komitmen Organisasi (X4), dan Budaya Etis Organisasi (X5) dan variabel independen yaitu; Fraud (Y).

Pola hubungan kedua variabel bersifat kausal, artinya definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berupa kuisisioner yang akan disebar kepada seluruh pegawai bagian keuangan dan pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Kuisisioner dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan operasional dari variabel yang akan diteliti pada setiap indikator, kemudian akan dijabarkan ke dalam bentuk pernyataan dan akan diberi skor atas jawaban dari masing-masing koresponden menggunakan skala linkert yang selanjutnya pengujian akan dilakukan dengan bantuan software untuk mengolah data secara statistik yakni menggunakan SPSS (Statistical Package for Socil Science) versi 23.

Dalam mengukur sikap dan persepsi individu atau suatu kelompok, diperlukan skala linkert dalam pengukurannya (Sugiyono, 2012:93). Skala linkert dalam kuisisioner yang digunakan memiliki 5 indikator skor 1-5.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah menentukan teknik pengumpulan data, selanjutnya hasil data yang terkumpul akan diolah untuk menentukan model dan alat analisis terbaik untuk pemecahan masalah dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bentuk model yang ditampilkan adalah Analisis Regresi Linier berganda, sebelum uji tersebut harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Analisis regresi ini juga dapat menjelaskan kontribusi masing-masing variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Sample penelitian ini adalah pegawai instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bekerja di bidang keuangan dan pengadaan barang/jasa. Instrumen data yang dipergunakan adalah data kuesioner yang tersebar secara langsung kepada responden dengan rentang waktu penyebaran mulai dari 2 Februari 2022 hingga 3 Maret 2022. Kuisisioner yang disebarakan berjumlah 196 dan kembali sebesar 174 dengan tingkat pengembalian sejumlah 89%. Dari 174 yang kembali, terdapat 13 kuisisioner yang gugur dikarenakan responden tidak melengkapi kuisisioner. Maka jawaban total responden yang dapat terolah sejumlah 161. Responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan dan rentang usia 26-60 tahun dengan latar belakang pendidikan responden rata-rata lulusan S1 dengan persentase paling tinggi yaitu 83%.

### Uji Normalitas

Uji program untuk mengetahui nilai residual berdistribusi normal atau tidak menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai sig. (*p-value*) > 0,05 yang berarti asumsi normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas diperoleh hasil 0,200. Dikarenakan tingkat sig > 0,05 dapat diartikan bahwa ketentuan  $H_0$  diterima atau data terdistribusi normal. Maka dari itu, asumsi normalitas pada uji ini terpenuhi ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas (*Kolmogrov-Smirnov*)

		Unstandardized Residual
N		161
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	45514457
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.047
	Negative	-.041
Test Statistic		.047
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data berdasarkan hasil uji SPSS versi 23

### Uji Multikolonieritas

Tidak ada hubungan linier yang kuat atau sempurna antar variabel bebas, dapat diketahui dari membandingkan perhitungan dari regresi berganda. Dasar analisis yang digunakan yaitu dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila *Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10. Hasil uji ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0.730	1.370
Penegakan Peraturan (X2)	0.639	1.564
Kesesuaian Kompensasi (X3)	0.691	1.448
Komitmen Organisasi (X4)	0.651	1.536
Budaya Etis Organisasi (X5)	0.790	1.266

Sumber : Data berdasarkan hasil uji SPSS versi 23

### Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui nilai residual atau nilai varians yang berbeda karena besarnya atau bertambahnya nilai salah satu nilai variabel bebas, penelitian ini menggunakan prosedur uji Glejser. Tabel di bawah ini menunjukkan persamaan regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas dengan ditunjukkan nilai *Sig* > 0,05 pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.062	.240		.258	.796
Pengendalian Internal (X1)	.051	.054	.086	.938	.350
Penegakan Peraturan (X2)	.079	.053	.147	1.490	.138
Kesesuaian Kompensasi (X3)	-.055	.040	-.131	-1.382	.168
Komitmen Organisasi (X4)	.022	.042	.052	.534	.594
Budaya Etis Organisasi (X5)	-.026	.047	-.050	-.563	.575

Sumber : Data berdasarkan hasil uji SPSS versi 23

### Analisis Regresi Linear Berganda

Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen (X) sebagai variabel dependen (Y). Hasil analisis nilai koefisien regresi ditunjukkan tabel berikut.

**Tabel 4.** Hasil uji regresi linear berganda

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
Y	(Constant)	.721	.396		1.821	.071	
	Pengendalian Internal (X1)	-.051	.089	-.042	-.572	.568	Tidak Signifikan
	Penegakan Peraturan (X2)	.227	.088	.205	2.589	.011	Signifikan
	Kesesuaian Kompensasi (X3)	.260	.066	.300	3.938	.000	Signifikan
	Komitmen Organisasi (X4)	.056	.069	.063	.803	.423	Tidak Signifikan
	Budaya Etis Organisasi (X5)	.307	.077	.284	3.986	0.000	Signifikan
	Alfa	: 5%					
	R	: 0,616					
R Square	: 0,380						
Adjusted R Square	: 0,360						
F Hitung	: 18,499				F Tabel	: 3,05	
Sig. F	: 0.000				t Tabel	: 1,975	

Sumber : Data berdasarkan hasil uji SPSS versi 23

Diketahui rumus perhitungan regresi linier berganda pada tabel 4 berikut ini :

$$Y = 0,396 + 0,089 X1 + 0,088 X2 + 0,066 X3 + 0,069 X4 + 0,077 X5 + e$$

### Uji Ketepatan Model (Uji F)

Hasil analisis regresi dinyatakan signifikan atau tidak dapat diketahui melalui uji ketepatan model atau uji F. Dari hasil uji tersebut terlihat pada tabel 4 di atas. Model regresi berganda diketahui

memiliki  $\text{sig.}F$  sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $F$  hitungnya sebesar  $18,499 > F$  tabel  $3,05$  sehingga model regresi dapat diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji untuk mengetahui varians dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar analisis adalah  $0 < R < 1$ . Diketahui pada tabel 4 nilai  $R$  Square sebesar  $0,380$ . Artinya terdapat jalinan antara variabel independen dan variabel dependen sebesar  $38\%$ . Sehingga variabel independen berkontribusi dalam memengaruhi variabel dependen sebesar  $38\%$  sedangkan  $62\%$  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan

### Pengaruh Pengendalian Internal ( $X_1$ ) terhadap *Fraud* ( $Y$ )

Hasil analisis diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar  $-0,572$  dengan  $\text{sig. } t$  sebesar  $0,568$  dengan  $t$  tabel sebesar  $1,975$  sehingga variabel Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh terhadap *Fraud* yang menunjukkan bahwa  $H_1$  ditolak.

Studi ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori dan studi terdahulu, semakin baik dan efektif pengendalian internal, maka semakin rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan. Pendapat Wilopo (2006) juga mendukung pernyataan ini bahwa keberadaan sistem pengendalian internal organisasi sangat penting, yang mencakup melindungi instansi dari kelemahan manusia, menekan adanya resiko penyimpangan dan tindakan tidak patuh. Perilaku kecurangan dapat ditanggulangi dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yang baik di dalam suatu organisasi atau pemerintahan.

Hal ini terjadi karena data menunjukkan jawaban dari responden yang tidak konsisten. Responden tersebut sebagian besar berasal dari Divisi Kesekretariatan dimana divisi tersebut memiliki pengaruh besar dalam instansi tersebut. Sesuai tugas dan fungsinya, Divisi Kesekretariatan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Divisi Kesekretariatan merupakan divisi yang dipercaya dan memiliki peran penting untuk membantu kelancaran kegiatan suatu instansi.

Dari divisi tersebut, sebagian besar responden yang menjawab pernyataan tidak konsisten adalah perempuan, karena gender perempuan memiliki kecenderungan untuk menghindari resiko. Pernyataan ini didukung oleh teori Fitrianiingsih (2015) bahwa, peran gender yaitu feminim dan maskulin mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan. Laki-laki akan bersaing tanpa ragu atau tidak mementingkan peraturan yang ada atau cenderung lebih berani dalam mengambil resiko, sedangkan perempuan dalam bersaing akan tetap mementingkan peraturan dan mempertahankan hubungan kerja yang baik atau cenderung menghindari resiko.

Hasil penelitian ini didukung oleh Aprilliyanti (2018), Novrita et al. (2019), dan Effendi, dkk (2018) yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi (*Fraud*).

### Pengaruh Penegakan Peraturan ( $X_2$ ) terhadap *Fraud* ( $Y$ )

Hasil analisis diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar  $2,589$  dan  $\text{sig. } t$  sebesar  $0,011$  dan  $t$  tabel sebesar  $1,975$  sehingga variabel Penegakan Peraturan berpengaruh positif terhadap *Fraud* yang menunjukkan bahwa  $H_2$  diterima.

Beberapa aturan harus digunakan untuk pengukuran dan penyajian laporan keuangan dalam standart akuntansi dibawah aturan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penegakan peraturan merupakan norma akuntansi yang harus ditaati oleh suatu organisasi terkait pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat (Rahmawati, 2012). Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmaidha (2016) dan Bartenputra (2016).

### Pengaruh Kesesuaian Kompensasi ( $X_3$ ) terhadap *Fraud* ( $Y$ )

Hasil analisis diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar  $-0,572$  dan  $\text{sig. } t$  sebesar  $0,000$  dan  $t$  tabel sebesar  $1,975$  sehingga variabel Kesesuaian Kompensasi berpengaruh positif terhadap *Fraud* yang menyatakan bahwa  $H_3$  diterima.

Selaras dengan teori keagenan yang mengungkapkan bahwa kemungkinan pegawai dalam melakukan kecurangan akan semakin kecil apabila semakin baik pula kompensasi yang diberikan. Menurut interpretasi teori keagenan Jensen & Meckling (1976), pemberian kompensasi yang cukup memungkinkan agen (manajemen) untuk bertindak atas keinginan principal (pemegang saham) dengan melaporkan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi dapat mempengaruhi kecenderungan pegawai pemerintah untuk melakukan kecurangan dikarenakan faktor dari individu atau karakter pegawai yang bekerja pada dinas Kabupaten Sidoarjo sangat mengharapkan kompensasi yang besar dan sesuai. Penelitian ini didukung oleh Softian (2017), Dewi (2017), dan Pravitasari (2016).

#### **Pengaruh Komitmen Organisasi (X4) terhadap *Fraud* (Y)**

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 0,803 dan sig. t sebesar 0,423 dan t tabel sebesar 1,975 sehingga variabel Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap *Fraud* yang menyatakan bahwa H4 **ditolak**.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah faktor internal yang merupakan pengaruh terbesar yang berasal dari dalam diri individu, seperti perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, pengalaman, dan motivasi (Bologna, 1993 dalam Pramudita, 2013). Keserakahan, keinginan gaya hidup mewah, dan pengakuan lebih atas hasil kerja juga mempengaruhi pegawai untuk melakukan kecurangan.

Hal ini terjadi karena data menunjukkan jawaban dari responden yang tidak konsisten. Responden tersebut sebagian besar berasal dari Divisi Kesekretariatan dimana divisi tersebut memiliki pengaruh besar dalam instansi tersebut. Sesuai tugas dan fungsinya, Divisi Kesekretariatan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekertariat Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Divisi Kesekretariatan merupakan divisi yang dipercaya dan memiliki peran penting untuk membantu kelancaran kegiatan suatu instansi.

Dari divisi tersebut, sebagian besar responden yang menjawab pernyataan tidak konsisten adalah perempuan, karena gender perempuan memiliki kecenderungan untuk menghindari resiko. Pernyataan ini didukung oleh teori Fitrianiingsih dalam Nugraha (2015) bahwa, peran gender yaitu feminim dan maskulin mempengaruhi laki-laki dan perempuan dalam membuat keputusan. Laki-laki akan bersaing tanpa ragu atau tidak mementingkan peraturan yang ada atau cenderung lebih berani dalam mengambil resiko, sedangkan perempuan dalam bersaing akan tetap mementingkan peraturan dan mempertahankan hubungan kerja yang baik atau cenderung menghindari resiko. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015).

#### **Pengaruh Budaya Etis Organisasi (X5) terhadap *Fraud* (Y)**

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,986 dan sig. t sebesar 0,000 dan t tabel sebesar 1,975 sehingga variabel Budaya Etis Organisasi berpengaruh positif terhadap *Fraud*. Dilihat dari nilai signifikansi t sebesar  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa Budaya Etis Organisasi berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* yang menyatakan H5 **diterima**.

Budaya organisasi didefinisikan sebuah susunan norma yang diyakini, diterapkan dan dirancang lebih luas oleh seluruh anggota organisasi yang berfungsi sebagai alat perekat, dan digunakan sebagai pedoman perilaku dalam mencapai tujuan organisasi (Zulkarnain, 2013). Artinya semakin baik budaya etika organisasi yang diterapkan, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Dalam lingkungan yang beretika, aturan perusahaan cenderung diikuti pegawai karena perilaku tersebut dapat diterima secara etis (Rae dan Subramanian, 2008). Hasil ini selaras dengan penelitian Noviriantini (2015) dan Virmayani (2017)

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan wawancara secara langsung agar data yang didapatkan lebih akurat. Selain itu instansi terkait diharapkan mengadakan pelatihan-pelatihan atau penyuluhan tentang akuntansi keuangan, mengkomunikasikan atau mendiskusikan informasi akuntansi keuangan dengan baik dan tepat sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitasnya dan dapat memberikan hasil yang positif bagi perkembangan perusahaan, sedangkan bagi Pimpinan hendaknya memanfaatkan pengalaman yang dimiliki secara optimal dalam

menyelesaikan tugas-tugasnya dan melakukan pengamatan terhadap kesalahan-kesalahan dimasa lalu sehingga faktor-faktor penyebab kesalahan diperbaiki untuk menunjang keberhasilan instansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ditulis menggunakan *style American Psychological Association 7th edition*, 80% dari referensi harus Adi, Moh Risqi Kurnia., Ardiyani, Komala, & Ardianingsih, Arum. (2016). Analisis Faktorfaktor Penentu Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, Vol.10.
- Adinda, Yanita Maya. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal*, 4(3).
- Adni, Lisa Zahratul. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai pada Dinas Kota Semarang. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Boynton, William C., Johnson, Raymond N., & Kell Walter G. (2003). *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Chandra, Devia Prapnalina. (2015). Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobogan. *Accounting Analysis Journal*, 4(3). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. *Standar Profesional Akuntan Publik*, Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Joseph, Oguda Ndege., & Albert, Odhiambo. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega Country. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1)
- Mulyadi. 2002, *Auditing Salemba Empat*, Yogyakarta.
- Munandar, 2001, *Psikolog industri dan Organisasi*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mustika, Dian., Hastuti, Sri, & Heriningsih, Suchyo. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 24-27 Agustus.
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Nawawi, Hadari. 2001, *MSDM Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Pramudita, Aditya. 2013. Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Rivai, V 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robbins 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. PT. Bhuana Ilmu, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sulistiyowati. 2007. Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah tentang Tindak Korupsi. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
- Sumarsono S, 2002, *Teori dan Praktek*, Gramedia Pustaka Utama Yogyakarta.
- Sumarsono S, 2004, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Transparency International. 2017. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017. ([http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017\\_Report1.pdf](http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf)) Diakses 1 oktober 2021.
- Tuannakota, T.M, 2007, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tunggal A.W. 2012, *Pedoman Pokok Audit Internal*. Harvarindo, Jakarta.
- Wilopo. 2008. Pengaruh pengendalian internal birokrasi pemerintah dan pelaku tidak etis birokrasi terhadap kecurangan akuntansi di pemerintah persepsi auditor badan pemeriksa keuangan. *Jurnal ventura* volume 11 no. 1 april 2008.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, 2(2). Semarang: Universitas Negeri Semarang.